

## STRUKTUR PELUANG POLITIK GERAKAN PERLAWANAN NELAYAN DESA TABANIO, KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Pathurrahman<sup>1</sup>, Enly Hadiyanor<sup>2</sup>, Siti Mauliana Hairini<sup>3</sup>, Terry Tabitha<sup>4</sup>.**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat<sup>1234</sup>  
pathurrahman@ulm.ac.id<sup>1</sup>, enly.hadiyanor@ulm.ac.id<sup>2</sup>, siti.hairini@ulm.ac.id<sup>3</sup>,  
terrytabitha@gmail.com<sup>4</sup>.

### *Abstract*

*This study aims to explain how the emergence of society movement fishers from Tabanio village employed the concept of the structure of political opportunities. Related studies structure more political opportunities in popular use macro in its scope, meanwhile cases like the movement of micro social done by the society there was very little villages are still falling, even though the concept has by function can be used in the spectrum which is broader in order to result in a finding of varying in specific cases. Presentation of data was used in the study a method of a sort of descriptive set technique qualitative data collection through observation and interview with informants purposively, qualitative data available for analysis technique which aimed to provide a deeply and actual study to phenomena. The findings of the research indicated there are four variables that marks the emergence of the resistance movement the community fishers from Tabanio village namely create access to political institutions, the constellation volatility elite power, inter-communal conflict elite and elite support to make a difference. The variables that mark create political opportunities structure triggered the emergence of society movement fishers from desa tabanio it turns out that is not in a political system single, but a combination of a political system represent a layer of political constellation at the level of the village and the level of supra-village. To achieve his success, actors movement need to find the momentum that had been right in a of the political environment so that they can be in a situation that have opportunity to build social action.*

**Keyword :** *Political Opportunity Structure, Social Movement*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kemunculan gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio menggunakan konsep Struktur Peluang Politik. Studi-studi terkait Struktur Peluang Politik lebih populer digunakan dalam ruang lingkup makro, sementara itu kasus-kasus mikro seperti gerakan sosial yang dilakukan masyarakat desa masih sangat minim, walaupun secara fungsional konsep tersebut dapat digunakan dalam spektrum yang lebih luas guna menghasilkan temuan yang bervariasi dalam kasus-kasus spesifik. Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber secara purposive, dengan teknik analisa data kualitatif yang bertujuan memberikan



gambaran secara mendalam dan aktual, terhadap fenomena yang diteliti. Temuan penelitian ini menunjukkan terdapat empat variabel yang menandai munculnya gerakan perlawanan masyarakat nelayan Desa Tabanio yakni terbukanya akses terhadap lembaga-lembaga politik, instabilitas konstelasi elit kekuasaan, konflik antar-kelompok elit dan adanya dukungan elit untuk melakukan perubahan. Variabel-variabel yang menandai terbukanya struktur peluang politik yang memicu munculnya gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio ternyata tidak berada pada sistem politik tunggal, melainkan kombinasi sistem politik yang merepresentasikan lapisan konstelasi politik pada level desa dan level supra-desa. Untuk mencapai keberhasilannya, aktor-aktor gerakan perlu mencari momentum yang tepat dalam suatu lingkungan politik sehingga mereka dapat berada dalam situasi yang menguntungkan untuk membangun gerakan sosial.

**Kata Kunci:** Struktur Peluang Politik, Gerakan Sosial

## PENDAHULUAN

Kerangka kehidupan demokrasi modern telah menempatkan gerakan sosial sebagai kekuatan penting dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik (Blumer, 1969; Bassis, et.al., 1980; Nugroho, 2020). Meskipun dianggap sebagai tindakan kontras dan tentatif dari interaksi antar individu sehari-hari, gerakan sosial merupakan fenomena universal yang mewarnai lanskap politik global hingga politik lokal (Marx dan Goodman, 1980). Bahkan gerakan-gerakan sosial berskala lokal seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa di Indonesia juga terus menunjukkan eksistensinya (Nasrullah, 2021). Salah satunya adalah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Tabanio, Kabupaten Tanah laut Kalimantan Selatan, dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi dari PT. Pertamina yang disalurkan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tabanio yang dianggap penuh kecurangan dan manipulatif sehingga merugikan masyarakat nelayan. Munculnya gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh warga desa ini turut mendorong studi-studi yang dilakukan para akademisi sosial dan politik guna memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi.

Secara garis besar, terdapat dikotomi teori besar yang lazim dalam studi gerakan sosial (Sztompka, 2004). Pertentangan tersebut melibatkan teori mobilisasi aktor yang bersifat *bottom-up*, menjelaskan gerakan sosial terjadi ketika keluhan, ketidakpuasan

maupun kekecewaan rakyat telah melewati batas tertentu, sehingga memunculkan spontanitas aksi kolektif, diikuti dengan pengerucutan pemimpin, pengorganisasian dan perumusan ideologi gerakan. Atau dengan kata lain, gerakan sosial diyakini lebih merupakan tindakan yang dibentuk secara sadar oleh para aktor. Pendekatan ini ditentang oleh kelompok akademisi yang meyakini fenomena gerakan sosial bersifat *top-down*, dimana dapat muncul dan mencapai keberhasilannya karena ditentukan oleh kondisi struktural yang memberikannya peluang politik.

Studi ini menggunakan pendekatan *Political Opportunity Structure (POS)* dalam menjelaskan bagaimana gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio dapat terbentuk untuk melakukan perlawanan terhadap SPBN Tabanio yang melakukan kecurangan dalam mendistribusikan BBM Solar bersubsidi dan telah merugikan nelayan. Studi ini menjadi menarik karena pendekatan POS lebih banyak dilakukan untuk mencermati aktivitas-aktivitas partai politik dan peran politisi, kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan, organisasi-organisasi/asosiasi-asosiasi internal, hingga sifat pembuatan keputusan politik (Abercrombie, Hill dan Turner, 2010). Secara teoritis, eksplanasi fenomena gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan masih terbatas, khususnya terkait mengapa suatu gerakan dapat berhasil ataupun mengalami kegagalan. Hal ini juga

berimplikasi pada masih lemahnya studi-studi dalam mengeksplorasi bagaimana struktur peluang politik yang memungkinkan gerakan perlawanan masyarakat desa itu dapat muncul. Kajian-kajian terkait struktur peluang politik yang melatari sebuah gerakan justru banyak diulas dalam ruang lingkup makro, di level politik negara ataupun multinasional. Sejauh ini studi-studi terkait gerakan sosial lebih terfokus menjelaskan motif, strategi, maupun faktor penghambat dan pendorong terjadinya gerakan sosial (Situmorang, 2007; Kamajaya, 2010). Jikapun ada, studi-studi tersebut juga masih didominasi tentang gerakan-gerakan yang dilakukan kaum tani di pedesaan (Landsberger, 1981; Scott, 2000; Mustain, 2007; Safitri, 2010). Sementara itu, studi-studi yang mengeksplorasi gerakan sosial di level mikro maupun pada kasus-kasus spesifik seperti gerakan yang dilakukan oleh masyarakat desa, khususnya yang ada di Indonesia dengan menggunakan analisis POS masih sangat minim. Sehingga memunculkan asumsi bahwa pendekatan POS kurang populer dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Secara fungsional, POS tidak hanya memiliki fleksibilitas dalam memberikan spesifikasi terhadap variabel-variabel peluang, namun juga memiliki kelenturan dalam menganalisis beragam kasus gerakan sosial maupun politik perseteruan (Meyer, 2004). Sehingga dalam upaya pengembangan literatur, POS dapat digunakan dalam spektrum lebih luas yang memungkinkan temuan-temuan yang bervariasi/beragam dalam kasus-kasus spesifik (Meyer, 2004; Sukmana, 2016). Inilah yang memungkinkan POS dapat secara elastis digunakan untuk menganalisis gerakan dengan karakteristik, lokasi dan variasi waktu yang berbeda. Oleh sebab itu, studi untuk menjelaskan gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio dengan menggunakan analisis POS menjadi penting untuk dilakukan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokus studi ini berada di Desa

Tabanio, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Desa Tabanio sangat menarik untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian karena memiliki konstelasi politik yang sangat dinamis, karena kekuasaan tidak didominasi oleh kepala desa. Selain itu, di Desa Tabanio juga memiliki banyak pengalaman dalam membangun gerakan sosial. Pengumpulan data dalam studi ini menggunakan multi sumber bukti, yang memungkinkan kepada peneliti untuk melacak jejak histori dari isu-isu yang dicermati, pemaknaan terhadap sikap maupun observasi secara mendalam terhadap objek studi. Basis analisis data bersifat triangulasi, melalui kegandaan, keragaman sumber data dan cara untuk mengumpulkan data serta mengorganisir informasi. Dalam proses pencarian data, dilakukan melalui *Desk Study* dan penelusuran arsip/dokumen yang relevan, observasi langsung dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini meliputi;

- a. Ketua & anggota BPD Desa Tabanio
- b. Kepala Desa Tabanio
- c. Sekretaris Desa Tabanio
- d. Perangkat Desa Tabanio
- e. Tokoh Masyarakat Desa Tabanio
- f. Nelayan dan Pemilik Kapal Desa Tabanio
- g. Anggota DPRD Tanah Laut, Fraksi Partai Gerindra

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Studi Gerakan Sosial

Eskalasi studi-studi gerakan sosial dapat dilacak dalam beberapa periodisasi. Konseptualisasi awal berlangsung pasca perang dunia II, sejak tahun 1940-1960-an dengan ciri khasnya terletak pada penekanan aspek irasional individu-individu yang membentuk gerakan. Periode kedua berlangsung pada dekade 1960-1970-an, dimana kajian gerakan sosial lebih diwarnai perspektif aktor rasional di dalam struktur sosial. Periode ketiga dimulai dari tahun 1970-an dengan memfokuskan pada analisis dekonstruksi gerakan sosial (Mirsal, 2004). Di era awal kajian gerakan sosial, terdapat dua kelompok akademisi yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan

gerakan sosial selanjutnya, yakni akademisi Amerika Utara dan akademisi negara-negara Eropa. Di Indonesia sendiri pasca reformasi, studi-studi gerakan sosial juga mengalami perkembangannya sendiri dengan memfokuskan pada gerakan-gerakan di ranah lokal, tidak terkecuali yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan.

Tingginya minat para akademisi dalam melakukan studi-studi gerakan sosial telah menempatkannya bukan lagi sebagai ranah kajian sosiologi, namun menjadi kajian ilmu politik, sejarah dan psikologi sosial. Oleh karenanya, konsep-konsep yang ditawarkan dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial juga banyak meminjam dan memodifikasi dari teori-teori lintas ilmu sosial. Sehingga dalam proses perkembangannya lebih lanjut, terdapat empat (4) pendekatan teoritis dalam kajian analisis gerakan sosial, yakni perilaku kolektif; mobilisasi sumberdaya; proses politik; serta gerakan sosial baru (Eyerman dan Jamison, 1991; Jenkins dan Klandermans, 1995; Klandermans, 1997; Canel, 1997; Tarrow, 1998; della Porta dan Diani, 1999; Singh, 2001; Manalu, 2007). Dalam istilah lain, keempat pendekatan teoritik tersebut bisa juga disebut sebagai pendekatan ketidakpuasan, pendekatan sumberdaya, pendekatan peluang politik, dan pendekatan proses-proses konstruksi pemaknaan (Klandermans, 1997).

Perspektif perilaku kolektif, menekankan analisis gerakan sosial pada munculnya reaksi ketidakpuasan masyarakat sebagai respon dari perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang menyebabkan ketidaksesuaian antara harapan dengan kondisi nyata yang dialami (Le Bon, 1960; Hoffer, 1951; Blumer, 1969; Kornhauser, 1959; Smelser, 1971; Toch, 1966; Gurr, 1970). Perspektif mobilisasi sumberdaya menjelaskan bagaimana gerakan sosial akan terjadi dan mampu bertahan justru karena para aktor mampu membangun organisasi gerakan dan memobilisasi berbagai sumberdaya potensial (material dan non-material) yang tersedia (Mancul Olson, 1965; Zald dan Ash, 1966; McCarthy and Zaid, 1977; Anthony Oberschall, 1973, 1978; Charles Tilly, 1978).

Selanjutnya Perspektif Proses Politik, menjelaskan bagaimana kemunculan dan keberhasilan suatu gerakan sosial justru sangat ditentukan dari terbukanya struktur peluang politik yang memberikan keuntungan terhadap gerakan tersebut (Michael Lipsky, 1970; Peter Eisinger, 1973; Jenkins and Perrow, 1977; McAdam, 1982; Tarrow, 1983, 1989, 1998; Kitschelt, 1986; Brockett, 1991). Pendekatan Gerakan Sosial Baru mulai meninggalkan tradisi lama kajian gerakan sosial dalam melihat relasinya terhadap isu-isu politik dan ekonomi, dimana titik fokusnya terletak pada isu-isu lingkungan, budaya dan identitas (Alaian Touraine, 1977, 1981; Clauss Offe, 1985; Laclau and Mouffe, 1985; Alberto Melluci, 1982, 1989, 1996; Inglehart, 1990; Rajendra Singh, 2001).

Dalam studi ini, konsep gerakan sosial yang digunakan mengacu pada tawaran yang dikemukakan Tarrow (1998), dimana gerakan sosial dipandang sebagai tantangan kolektif yang dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai solidaritas dan tujuan sama, yang membangun interaksi berkesinambungan dengan kelompok elite, penguasa dan pihak lawan. Penelitian ini meyakini bahwa konteks politik merupakan latar determinan yang mempengaruhi kemunculan maupun keberhasilan dari suatu gerakan. Hal ini secara tegas berimplikasi terhadap pendekatan yang digunakan, dengan menempatkan Teori Struktur Peluang Politik (POS) sebagai kerangka analisisnya.

### **Struktur Peluang Politik Sebagai Pemicu Gerakan Sosial**

Untuk pertama kalinya, mekanisme struktur kesempatan politik yang mempengaruhi gerakan sosial diperkenalkan oleh Peter Eisinger dalam artikelnya yang berjudul *American Political Science Review* yang diterbitkan pada tahun 1960-an (Situmorang, 2007). Eisinger dipengaruhi oleh pemikiran Tocqueville yang menegaskan bahwa revolusi akan muncul bukan karena kelompok masyarakat dalam kondisi tertekan, melainkan disebabkan oleh sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan. Selanjutnya, popularitas teori struktur peluang politik (*political opportunity structure*) atau Teori Proses Politik (*political process theory*)

semakin menemukan momentumnya ketika Douglas McAdam pada tahun 1982 mempublikasikan bukunya “*Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*” (Locher, 2002).

McAdam menyebutkan dalam melakukan studi-studi gerakan sosial, struktur peluang politik (*political opportunity structure*) merupakan faktor determinan dalam menganalisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, selain faktor struktur mobilisasi (*mobilizing structures*) dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*) (McAdam, McCarthy dan Zald, 2004; Locher 2002). Dibandingkan perspektif ekonomi dan perspektif personal/psikologis, perspektif *Political Opportunity Structure* (POS) lebih menitik-beratkan perspektif politik sebagai basis penjelasan mengapa warganegara berhasil melakukan gerakan sosial (Sukmana, 2016). POS memberikan perhatian secara sistematis konteks politik yang melatari sebuah gerakan, termasuk institusi-institusi yang ada di dalam lingkungan politik tersebut. Keberhasilan maupun kegagalan gerakan sangat ditentukan oleh struktur peluang politik. Dalam logika ini, dapat dipahami mengapa pendekatan peluang politik sangat relevan dalam membedah fenomena gerakan sosial. Konteks relasi kuasa antara elit dan massa serta konstelasi lingkungan politik yang dinamis menjadikan perspektif politik sebagai pisau analisis yang diperlukan dalam menjelaskan gerakan sosial.

Singkatnya, POS merupakan suatu ekspresi yang bertujuan melakukan analisa tentang keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan sosial. Para ilmuwan menggunakan konsep POS karena dapat diterapkan secara umum dalam menganalisis gerakan pada konteks global hingga lokal, dimana suatu struktur sangat spesifik serta setiap lokasi memiliki perbedaan dan variasi tersendiri dari waktu ke waktu (Tarrow, 1994).

### **Struktur Peluang Politik Gerakan Perlawanan Masyarakat Nelayan Tabanio**

Kemunculan gerakan perlawanan masyarakat nelayan Desa Tabanio terhadap pengelola SPBN Tabanio sangat ditentukan dari variabel-variabel struktur peluang politik yang melatarinya. Variabel peluang politik tersebut yakni terbukanya akses lembaga-lembaga politik, tercerai-berainya keseimbangan politik dan belum terbentuknya keseimbangan politik yang baru, terjadinya konflik antar elit politik, serta adanya dukungan para elit terhadap gerakan untuk melakukan perubahan (McAdam dan Tarrow, 2001).

### **Terbukanya Akses terhadap Lembaga-lembaga Politik**

Dalam variabel ini dapat dibagi menjadi dua lapisan, yakni di level desa dan supra-desa. Pada level desa, terbukanya akses kekuasaan ditandai dari responsifnya lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tabanio terhadap keluhan masyarakat nelayan. Ketua dan para anggota BPD Tabanio begitu kooperatif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dengan segera mengadakan rapat internal untuk menentukan langkah yang akan diambil oleh BPD Tabanio. Pada Kamis, 23 Desember 2021 BPD Tabanio mengundang *stakeholder* terkait untuk mengadakan rapat bersama membahas permasalahan distribusi solar bersubsidi. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Desember 2021, bertempat di Balai Desa Tabanio dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Tabanio, Ketua dan Anggota BPD Tabanio, pemilik kapal dan nelayan Desa Tabanio, Hajjah Nurul Tasiah selaku Pengelola SPBN Tabanio, BABINKAMTIBMAS Desa Tabanio dan Perwakilan Anggota TNI Angkatan Laut. Dalam rapat tersebut BPD Tabanio tidak hanya mengkritisi kebijakan dari SPBN Tabanio, namun juga meminta penjelasan dan klarifikasi pengelola SPBN Tabanio terkait distribusi solar bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat nelayan Tabanio.

Penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pengelola SPBN tadi rupanya tidak membuat para pemilik kapal dan anak buah kapal merasa puas. Masyarakat nelayan pada dasarnya merasa kecewa dan memilih untuk bersikap resisten dengan penjelasan Hajjah

Nurul, sehingga dialog yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam di balai desa Tabanio berjalan dengan penuh ketegangan. Masyarakat nelayan dan Anggota BPD Tabanio meminta normalisasi harga dan standarisasi pengelolaan SPBN Tabanio segera diimplementasikan oleh Hajjah Nurul. Namun saat itu dialog mengalami *dead-lock* (kebuntuan), karena pihak pengelola SPBN tetap bergeming dan bersikukuh mempertahankan kebijakan yang telah dijalanannya selama ini. Para pemilik kapal yang merasa muak dan kecewa terhadap kebijakan pengelola berangsur-angsur meninggalkan balai desa, meskipun rapat belum usai. Walaupun pertemuan yang difasilitasi oleh BPD Tabanio belum mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan, namun Muhammad Iqbal selaku Ketua BPD Tabanio menyatakan BPD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan untuk mendapatkan distribusi solar bersubsidi sesuai dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan PT. Pertamina.

Pada persoalan ini, BPD Tabanio memiliki sikap yang berbeda dengan Madiansyah, Kepala Desa Tabanio yang lebih memilih untuk bersikap tertutup dan meredam persoalan distribusi solar bersubsidi ini agar tidak muncul ke permukaan. Masyarakat nelayan menengarai Madiansyah menjadi sekutu Hajjah Nurul yang berupaya memberikan dukungan terhadap Hajjah Nurul Tasiah selaku pengelola SPBN Tabanio. Terdapat beberapa landasan yang menjelaskan mengapa BPD Tabanio bersikap lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat desa. *Pertama*, fungsi *check and balances* yang dijalankan oleh BPD Tabanio sangat optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, khususnya kepala desa. BPD Tabanio secara terbuka telah memposisikan dirinya sebagai kekuatan oposan kepala desa, yang menurut mereka tidak aspiratif dan solutif terhadap keluhan-keluhan warga desa. Pemilihan anggota BPD Tabanio yang dilaksanakan pada 2020 yang lalu melahirkan anggota-anggota yang relatif sangat muda. Dari 9 anggota BPD yang terpilih, hanya 2 orang yang berusia di atas 40 tahun, bahkan sebagian besar dari anggotanya masih berusia di bawah 40 tahun. Anggota BPD Tabanio

saat ini merupakan pengalaman pertama, dan merasa memiliki karir yang panjang jika masyarakat puas terhadap mereka. Sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah dan kepercayaan konstituen mereka. Masyarakat desa menganggap, orang-orang muda yang menjadi anggota BPD tidak hanya enerjik dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga relatif masih memiliki idealisme dan semangat untuk memajukan desa. Inilah yang menjadikan masyarakat desa lebih suka menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada anggota BPD ketimbang ketua-ketua RT dan kepala dusun yang berada di bawah struktur kekuasaan kepala desa, karena anggota BPD memiliki kekuasaan untuk mengawasi kepala desa dan menjalankan fungsi *check and balance*.

*Kedua*, mayoritas anggota juga BPD memiliki tingkat pendidikan yang baik, dimana 5 orang anggotanya berprofesi sebagai guru sekolah SD, SMP dan guru taman pendidikan Al-Qur'an. Mereka ini menduduki posisi inti dalam struktur organisasi BPD, seperti Iqbal sebagai Ketua, Syamsul sebagai Wakil Ketua, Agustina sebagai Sekretaris, Asmuri sebagai Ketua Bidang Pemerintahan Desa, serta Gusti Muhammad Abdurrahman sebagai Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Latar pendidikan sarjana yang dimiliki anggota-anggota BPD ini turut membentuk pola pikir, cara pandang serta pemahaman yang lebih baik terhadap tugas pokok dan fungsi mereka sebagai anggota BPD.

*Ketiga*, persoalan distribusi solar bersubsidi ini menjadi momentum anggota-anggota BPD Tabanio untuk memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat desa terhadap eksistensi BPD Tabanio sebagai lembaga artikulasi dan agregasi kepentingan warga desa. Anggota BPD Tabanio ingin menunjukkan kepada masyarakat desa bahwa mereka telah bersungguh-sungguh bekerja dan menjalankan amanah atas jabatan yang diberikan.

Selanjutnya pada level Pemerintah Supra Desa, terbukanya akses kekuasaan ditandai dari upaya Khairil Anwar selaku

anggota DPRD Tanah Laut Fraksi Partai Gerindra untuk membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi masyarakat pada saat dirinya melakukan reses di Desa Tabanio pada tanggal 4 November 2021. Khairil Anwar adalah warga Desa Tabanio yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada pemilu legislatif tahun 2014 dan pemilu legislatif 2019, dimana Desa Tabanio merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari daerah pemilihannya. Kegiatan reses tersebut diadakan di rumah salah satu warga Desa Tabanio yang bernama Haji Ahmad Hormansyah. Para nelayan dan pemilik kapal mengeluhkan kepada Khairil Anwar terkait persoalan distribusi solar bersubsidi. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, mereka merasa telah banyak dirugikan oleh Hajjah Nurul Tasiah, selaku pihak pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di Desa Tabanio. Masyarakat nelayan menganggap pangkalan SPBN Tabanio dioperasikan secara manipulatif, karena dinilai sarat akan ketidak-jujuran dan ketidak-profesionalan. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat nelayan menyampaikan aspirasi mereka terkait beberapa hal:

1. Penyaluran solar bersubsidi di desa Tabanio belum diawasi dengan baik
2. Harga jual solar bersubsidi yang dipatok oleh SPBN Tabanio mencapai Rp 5.500,-/liter, dimana harga tersebut di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pertamina, yakni Rp 5.150,-/liter.
3. Masyarakat nelayan menginginkan agar kuota pembelian solar bersubsidi tidak dibatasi secara sepihak oleh pihak pengelola. Selama ini mereka merasa kebutuhan bahan bakar untuk kapal-kapal nelayan di Tabanio terkadang tidak mencukupi, dan terpaksa sebagian para pemilik kapal harus membeli solar kepada para pengecer di luar Desa Tabanio, walaupun dengan harga mahal, di atas Rp 8.000,- per liternya. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memastikan setiap kapal yang melaut mampu beroperasi hingga 2 minggu di laut.
4. Beberapa pemilik kapal juga mengeluhkan kuota distribusi solar bersubsidi yang tidak merata kepada

sesama para pemilik kapal, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan diantara mereka. Beberapa orang pemilik kapal justru diberikan suplai solar bersubsidi yang relatif melebihi keperluan mereka, hanya karena dianggap memiliki kedekatan secara personal dan mendukung secara penuh apapun yang menjadi kebijakan pengelola SPBN Tabanio.

5. Para pemilik kapal menyayangkan ketika pembelian solar bersubsidi di SPBN Tabanio, mereka harus menyerahkan uang terlebih dahulu kepada pihak pengelola, baru kemudian beberapa hari kemudian kouta solar tersebut didistribusikan oleh pengelola.

Setelah menyimak dan mencatat berbagai keluhan masyarakat nelayan terkait pengelolaan SPBN Tabanio, Khairil Anwar berkomitmen untuk menyampaikan secara langsung persoalan ini kepada Ketua DPRD Tanah Laut. Khairil Anwar kemudian memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Tabanio untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat nelayan tersebut. Sebagai warga Tabanio, Khairil Anwar juga menyarankan kepada pemerintah desa untuk secepatnya mengadakan rapat dengan seluruh pemilik kapal dan para anak buah kapal untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dan sekaligus warga Desa Tabanio, Khairil Anwar tentu tidak bisa menutup mata atas persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan Tabanio. Khairil Anwar memiliki banyak hubungan kekerabatan dengan masyarakat desa Tabanio. Selain itu, masyarakat Tabanio merupakan basis konstituen Partai Gerindra dan Khairil Anwar dalam mendulang suara pada pemilu legislatif 2014 dan 2019 yang lalu. Desa Tabanio merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yang mencapai 5.123 jiwa dengan 3.064 pemilih. Sehingga secara tidak langsung Khairil Anwar memiliki kepentingan besar terhadap warga Desa Tabanio. Inilah yang membuat Khairil Anwar membuka diri dan turut memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Tabanio.



Jalur lain terbukanya akses kekuasaan di institusi politik formal juga ditandai dari ketua-ketua partai politik yang memberikan perhatian terhadap persoalan masyarakat nelayan Tabanio. Hajjah Mariana, Ketua Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 07 April 2022 telah membuka ruang komunikasi dengan mempersilahkan perwakilan masyarakat nelayan Tabanio untuk bertemu dan menyampaikan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Aspirasi Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan itu, Hajjah Mariana meminta kepada beberapa anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut yang juga berhadir di tempat tersebut seperti Haji Atmari yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tanah Laut dan Khairil Anwar untuk membantu mengawal persoalan nelayan Tabanio melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat di DPRD Tanah Laut. Sejak pemilu 2014, Desa Tabanio menjadi lokasi strategis bagi pemenangan Partai Gerindra di Kabupaten Tanah Laut. Bahkan pada tahun 2019 yang lalu, Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan menghibahkan satu unit mobil ambulance kepada masyarakat Desa Tabanio sebagai apresiasi atas dukungan masyarakat Tabanio terhadap Partai Gerindra. Selain itu, elit Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Haji Abidin dan Hajjah Mariana memiliki banyak jaringan kerabat di Desa Tabanio. Oleh sebab itu, Desa Tabanio menjadi desa yang mendapatkan perhatian tersendiri oleh elit Partai Gerindra.

Gerakan masyarakat nelayan Tabanio ini juga mendapat perhatian dari Haji Nurdin selaku Ketua PDIP DPC Tanah Laut. Terdapat 4 orang perwakilan masyarakat nelayan Tabanio yakni Haji Yuspiani, Muhammad Iqbal, Hamzah dan Masdiana pada tanggal 11 April 2022 berhasil menemui Haji Nurdin di kediaman pribadinya untuk menyampaikan persoalan distribusi solar bersubsidi di Tabanio. Selain itu, perwakilan masyarakat nelayan juga meminta dukungan kepada Haji Nurdin agar permasalahan ini segera dapat diselesaikan. Kemampuan dari aktor-aktor gerakan masyarakat nelayan Tabanio untuk melakukan komunikasi dan meminta dukungan dari Ketua PDIP Tanah

Laut ini tidak terlepas dari hubungan kekerabatan yang dimiliki Haji Nurdin dan dengan beberapa warga Desa Tabanio. Sehingga melalui jaringan informal, masyarakat nelayan Desa Tabanio, seperti Haji Yuspiani dapat melakukan lobi dan menyampaikan aspirasi mereka dengan lebih efektif. Disamping itu, Haji Nurdin juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan kepercayaan dan simpati dari masyarakat nelayan Tabanio, karena dirinya akan berkompetisi sebagai calon kepala daerah dalam pilkada Tanah Laut pada tahun 2024 yang akan datang.

Terbukanya akses kekuasaan dan dukungan politik dari elit Partai Gerindra dan elit PDIP Tanah Laut memberikan sinyal kuat terhadap peluang bagi munculnya gerakan masyarakat nelayan Tabanio, serta memberikan kepercayaan diri bagi gerakan tersebut untuk membawa persoalan ini ke dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tanah Laut. Partai Gerindra dan PDIP masing-masing memiliki 6 kursi di DPRD Tanah Laut. Hal ini menjadikannya sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2019, sekaligus menempatkan kader PDIP yakni Muslimin di posisi Ketua DPRD dan kader Partai Gerindra, yakni haji Atmari sebagai Wakil Ketua I DPRD Tanah Laut. Terbukanya akses kekuasaan terhadap partai-partai yang memiliki kekuatan dominan di DPRD Tanah Laut, berimplikasi dalam mempermudah gerakan masyarakat Tabanio untuk membawa agenda-agenda mereka memasuki jalur kekuasaan lembaga legislatif. Sehingga pada tanggal 17 Mei 2022, sebanyak 50 orang dari perwakilan masyarakat nelayan Tabanio berhasil melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tanah Laut.

**Tabel 1. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Periode 2019-2024**

NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI
PDIP	6
Gerindra	6
Golkar	4
Nasdem	4
PKB	3
PKS	3
PAN	3

Hanura	2
Demokrat	2
PPP	2

Sumber: <https://dprd.tanahlautkab.go.id/>

### Tercerai-berainya Keseimbangan Politik dan Belum Terbentuknya Keseimbangan Politik yang Baru

Sebagaimana yang dipaparkan Mc Adams (2001), saat tercerai-berainya keseimbangan politik serta belum terbentuknya keseimbangan politik yang baru akan sangat menguntungkan bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah gerakan. Dalam kasus kemunculan perlawanan masyarakat nelayan Tabanio, kondisi instabilitas konstelasi politik yang melatari terjadi dalam dua level. Pada level desa, ditandai dari dekonsolidasi aliansi kelompok elit yang mendukung Hajjah Nurul Tasiah dalam menjalankan usahanya sebagai pengelola SPBN Tabanio. Faktor utama dari melemahnya kekuatan kelompok elit yang pro terhadap Hajjah Nurul Tasiah karena Habib Nunci Assegaf meninggal dunia pada 03 November 2021. Sejak Hajjah Nurul Tasiah mendapatkan kontrak dari PT. Pertamina untuk mendistribusikan BBM Solar bersubsidi di Tabanio pada tahun 2013, Habib Nunci dmenjadi patron Hajjah Nurul Tasiah yang melindungi bisnis distribusi solar yang dijalankan SPBN Tabanio. Walaupun distribusi solar berubsidi yang dilakukan SPBN Tabanio merugikan masyarakat nelayan, namun karena Hajjah Nurul mendapat dukungan Habib Nunci Assegaf, masyarakat takut melakukan protes maupun perlawanan terhadap pengelola SPBN Tabanio. Habib Nunci Assegaf merupakan aktor yang sangat berpengaruh sekaligus disegani oleh warga desa.

Seluruh masyarakat Desa Tabanio beragama Islam dan dikenal sangat religius. Warga desa Tabanio memberikan *privilege* kepada habaib (*habib*) karena dianggap sebagai sosok yang sakral dan dimuliakan, dimana terdapat kepercayaan bila memusuhi habaib akan menghilangkan keberkahan dari kehidupan mereka. Habib Nunci Assegaf berusia 73 tahun, merupakan aktor informal/*non-governing elite* yang memiliki jaringan luas kepada para ulama, pejabat pemerintah, pengusaha hingga tokoh politik di wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan dalam

beberapa aksi massa dan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh warga desa, Habib Nunci Assegaf menjadi salah satu tokoh utamanya. Meninggalnya Habib Nunci Assegaf menjadikan dukungan dan kuasa yang dimiliki Hajjah Nurul Tasiah melemah secara signifikan. Relasi kuasa antara kelompok elit yang berpihak kepada Hajjah Nurul Tasiah dengan masyarakat nelayan yang tidak puas dengan SPBN Tabanio menjadi tidak seimbang. Sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat nelayan yang tidak puas terhadap pengelolaan SPBN Tabanio untuk mulai melakukan aksi protes dan membangun gerakan perlawanan.

Level supra-desa, stabilitas konfigurasi kekuasaan juga belum terbentuk, karena disebabkan oleh masih labilnya soliditas kelompok elit politik di tingkat kabupaten. Relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tanah Laut berjalan disharmonis, yang berimplikasi terhadap terbelahnya pemerintahan (*divided government*). Terbukanya kans Partai Gerindra maupun PDIP Tanah Laut untuk mengusung masing-masing kadernya pada pilkada Tanah Laut 2024 akan memberikan ancaman tersendiri bagi Sukamta yang tengah menjabat Bupati Tanah Laut saat ini untuk mencalonkan diri kembali pada pilkada yang akan datang sebagai calon petahana. Sukamta memiliki latar belakang sebagai birokrat di Tanah Laut, sehingga dianggap bukan berasal dari kader partai politik manapun. Sementara itu, Partai Gerindra yang menjadi partai pengusung Sukamta pada pilkada 2018 yang lalu juga akan mendukung kader partai mereka sendiri untuk berkompetisi pada Pilkada Tanah Laut 2024. Persaingan antara kekuatan Partai Gerindra, PDIP dan Sukamta sebagai kepala daerah menyebabkan konsentrasi kekuasaan terpecah, dan dominasi kekuasaan tidak dimiliki oleh kelompok elit manapun.

**Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pilkada Bupati Tanah Laut 2018**

NO URUT	PASANGAN CALON	SUA RA	PARTAI PENDUK UNG
---------	----------------	--------	-------------------

1	Drs. H. Sukamta Abdi Rahman, S.Pd	107.899 (62,33%)	PKS, PKPI, Gerindra
2	H. Bambang Alamsyah, S.T. Ir. H. Ahmad Nizar, S.Sos., M.Si	65.220 (37,67%)	Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, PDIP

Sumber: PUSKAPOL UI 2018

Kondisi ini memberikan keuntungan bagi gerakan masyarakat nelayan Tabanio karena tidak adanya kekuasaan determinan yang dapat menghambat gerakan mereka. Peluang munculnya resistensi dari dominasi kekuasaan di level Kabupaten Tanah Laut juga semakin dapat diminimalisir. Sebaliknya, tersebarnya kekuasaan di berbagai kelompok elit membuat gerakan masyarakat Tabanio memiliki banyak peluang untuk mendapatkan dukungan dari masing-masing kelompok elit.

#### **Konflik Antar Elit Politik**

Peluang politik yang memberikan keuntungan bagi gerakan yang masyarakat nelayan Tabanio yakni konflik diantara kelompok elit yang terdapat di level desa maupun konflik elit di level supra-desa. Pada level desa, konflik elit terjadi antara Madiansyah sebagai kepala Desa Tabanio dengan ketua dan anggota-anggota BPD Tabanio. Konflik ini merepresentasikan polarisasi kekuatan eksekutif dan legislatif di Desa Tabanio, dimana konflik ini dilatarbelakangi oleh dua aspek. Aspek pertama, dilandasi dari perbedaan sikap kepala desa dan anggota-anggota BPD dalam merespon aspirasi maupun keluhan masyarakat. Kepala desa dianggap masyarakat bersifat pasif dan resisten dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga desa. Sebaliknya, anggota-anggota BPD lebih pro-aktif dalam menghadapi aspirasi warga desa. Perbedaan sikap ini kerap menempatkan kepala desa dan BPD dalam posisi *vis a vis* dalam merespon aspirasi masyarakat, sehingga konflik antara kepala desa dan BPD menjadi tidak terhindarkan.

Aspek kedua, terjadinya konflik antara kepala desa dan anggota BPD dilatari oleh dinamika politik pilkades Tabanio. Selain menjalankan fungsinya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga desa, anggota-anggota BPD Tabanio juga memiliki motif politis tersendiri. Posisi Ikbal sebagai Ketua BPD adalah posisi paling strategis yang memberikannya panggung politik untuk terus memperkuat simpati dan dukungan politik masyarakat terhadapnya. Ketua BPD menjadi ikon populer sebagai penyambung lidah warga Desa Tabanio. Muhammad Ikbal sendiri secara terbuka telah menyatakan ambisinya untuk maju sebagai calon kepala desa di pilkades periode mendatang. Kepemimpinan kepala desa yang saat ini banyak mengecewakan masyarakat menjadi keuntungan tersendiri bagi Ikbal, sehingga Ikbal memilih memposisikan dirinya sebagai oposan dari kepala desa. Begitu juga dengan Syamsul, Wakil Ketua BPD ini dinilai masyarakat sangat kritis terhadap kepala desa. Sikap Syamsul ini cukup beralasan karena Syamsul adalah adik kandung dari Sauliani, calon kepala desa yang diungguli oleh Madiansyah, dengan terpaut hanya 56 suara pada pilkades 2019 silam. Syamsul memiliki "Dendam Politik" tersendiri kepada Madiansyah. Dendam politik ataupun sakit hati yang sama juga dirasakan Asmuri, karena dirinya juga mencalonkan diri dalam pilkades 2019. Walaupun gagal memenangkan pilkades, namun Asmuri kembali mencalonkan diri dalam pemilihan anggota BPD Tabanio, dan berhasil mendapatkan mandat dari masyarakat sebagai anggota BPD. Sedikit berbeda dengan Rahmani, yang sebelumnya merupakan salah satu tim sukses pemenangan Madiansyah yang kemudian berbalik arah orientasi politiknya karena kecewa terhadap kepemimpinan Madiansyah selama menjabat kepala desa. Selain itu Rahmani juga memiliki tanggung-jawab moril tersendiri untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di wilayahnya yang juga merasa tidak puas dengan pengelola SPBN Tabanio, karena Rahmani merupakan anggota BPD yang memiliki perolehan suara tertinggi pada saat pemilihan anggota BPD Tabanio dilaksanakan.

Konflik yang membawa konfrontasi antara kepala desa dan BPD di Desa Tabanio, telah memberikan keuntungan bagi aktor-aktor gerakan untuk mencari dukungan politik (Tarrow, 1998; Tarrow, 2011). Akan sangat terbuka kesempatan bagi gerakan masyarakat nelayan untuk mendapatkan dukungan dari elit, ketika para elit saling berkonflik. Elit yang berkonflik ternyata juga memerlukan dukungan massa dan aktor-aktor gerakan untuk memperkuat legitimasi dan daya tawar terhadap elit yang menjadi lawan-lawan mereka. Terdapat relasi simbiosis mutualisme melalui pertukaran dukungan antara elit dan massa gerakan.

Pada level supra desa, disaat yang bersamaan elit politik di Kabupaten Tanah Laut juga tengah berada pada situasi konfliktual. Walaupun Pilkada Tanah Laut dilaksanakan pada tahun 2024, namun ternyata pada tahun 2022 suhu politik mulai memanas. Partai Gerindra dan PDIP masing-masing berambisi untuk mengusung kader mereka sebagai kandidat kepala daerah Tanah Laut. Sebagai partai yang sama-sama memiliki kekuatan dominan dan mengincar posisi kepala daerah, persaingan antara kedua partai tersebut turut menyeret para elit-elit partai di dalamnya untuk saling berkonflik. Konflik antar elit politik ini semakin kompleks ketika Partai Gerindra secara implisit melepaskan dukungannya terhadap pemerintahan Sukamta sebagai Bupati Tanah Laut periode 2018-2023. Walaupun Partai Gerindra merupakan partai pendukung utama Sukamta pada Pilkada Tanah Laut 2018, Sukamta bukanlah kader Partai Gerindra karena berlatar belakang sebagai birokrat. Sebagai petahana Sukamta kembali akan mencalonkan diri pada Pilkada Tanah Laut 2024. Hal ini membuat Partai Gerindra melepaskan dukungannya terhadap eksekutif, sembari memfokuskan untuk mempersiapkan kader partainya menghadapi pilkada. Sementara itu, PDIP sebagai partai yang dikalahkan Sukamta dan Partai Gerindra pada pilkada 2018 yang lalu, memilih menjadi oposan di terhadap pemerintahan Sukamta dan mempersiapkan kadernya untuk memenangkan pilkada 2024. Karena sama-sama menginginkan posisi calon kepala daerah pada pilkada, maka persaingan

dan konflik diantara kekuatan elit Partai Gerindra, elit PDIP, dan Sukamta menjadi tidak terhindarkan.

Konflik diantara elit politik tidak selamanya membawa dampak negatif bagi masyarakat (McAdam dan Tarrow, 2001). Konflik diantara kelompok elit politik membuat kelompok-kelompok mereka saling bersaing dan memerlukan dukungan massa untuk memperkuat posisi pengaruhnya terhadap kelompok elit lawan. Secara tidak langsung konflik antar kelompok elit membuat lingkaran elit menjadi terbuka untuk dilakukan penetrasi oleh gerakan (Meyer, 2004; Mirsel 2004). Selain itu, konflik yang terjadi juga berimplikasi terhadap meningkatnya posisi tawar dari gerakan masyarakat Tabanio untuk menjadi aliansi dari kelompok elit yang berkonflik. Gerakan akan lebih mudah beraosiasi dengan salah satu atau beberapa kelompok elit yang bertikai untuk mencari perlindungan, sepanjang tidak terdapat perbedaan visi yang saling bertolak-belakang. Sehingga diharapkan kelompok elit yang telah menjadi aliansi gerakan mampu mengakomodir dan membantu gerakan untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutannya.

Konflik yang melibatkan elit politik dan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut, memberikan peluang bagi gerakan Masyarakat Nelayan Tabanio untuk melakukan penetrasi ke dalam lingkaran elit Partai Gerindra dan PDIP, termasuk Bupati Sukamta untuk menjajaki aliansi dan mencari dukungan dari kelompok elit. Di satu sisi, elit Partai Gerindra, PDIP dan Bupati Sukamta juga memerlukan dukungan masyarakat Tabanio untuk memuluskan langkah mereka menghadapi Pilkada Tanah Laut 2024. Ketika terjadi perebutan pengaruh menjelang pilkada, masing-masing kelompok elit berkepentingan mencari aliansi-aliansi baru untuk memantapkan langkah politik mereka pada Pilkada 2024, termasuk menjadikan Gerakan Masyarakat Nelayan Tabanio sebagai mitra strategis mereka. Sehingga elit Partai Gerindra, elit PDIP dan Bupati Sukamta memberikan respon yang positif terhadap kemunculan Gerakan Masyarakat Nelayan Tabanio.

### **Dukungan Para Elit Terhadap Gerakan untuk Melakukan Perubahan**

Penanda terbukanya peluang politik Gerakan Masyarakat Nelayan Tabanio ketika para aktor gerakan berhasil menggolong dukungan para elit untuk melakukan perubahan (McAdam dan Tarrow, 2001). Pada level mikro di Desa Tabanio, aktor-aktor gerakan seperti Muhammad Fahmi, Haji Yuspiani dan Haji Runi yang menjadi motor gerakan mampu mendapatkan dukungan dari beberapa elit Desa Tabanio. Pertama, Muhammad Iqbal yang menjabat sebagai Ketua BPD. Di saat Kepala Desa Tabanio (Madiansyah) berupaya meredam aksi protes masyarakat terhadap pengeleloa SPBN Tabanio, Muhammad Iqbal sebagai Ketua BPD justru memilih bersikap berseberangan dengan kepala desa. Muhammad Iqbal memberikan dukungan penuh untuk memperjuangkan tuntutan masyarakat nelayan yang merasa dirugikan oleh pengelola SPBN Tabanio. Bersama para aktor gerakan lainnya, Muhammad Iqbal. Elit desa kedua yang memberikan dukungan adalah Ahmad Sahidan. Sebagai Sekretaris Desa Tabanio, Ahmad Sahidan memiliki peran strategis dalam memperkuat gerakan. Dukungan Ahmad Sahidan terhadap gerakan mampu mempersempit ruang gerak kepala desa untuk memperkuat pengaruh dan mencari dukungannya terhadap aparat perangkat desa lainnya. Sehingga sangat kecil kemungkinan kepala desa dapat melakukan manipulasi data ataupun menyalahgunakan informasi, karena ada kontrol yang kuat dari sekretaris desa dan aparat perangkat desa lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sekretaris desa berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat desa dan bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sehingga sekretaris desa memiliki pengaruh besar terhadap aparat perangkat desa lainnya. Akibatnya mayoritas aparat perangkat desa memilih bersama-sama sekretaris desa untuk mendukung gerakan. Dalam aktifitas pemerintahan desa, sekretaris desa merupakan koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang mampu memberikan suplai data, arsip dan dokumen, maupun administrasi surat menyurat lainnya yang

dibutuhkan oleh gerakan masyarakat nelayan Tabanio. Selain itu, sekretaris desa juga berperan penting dalam membantu penyediaan prasarana desa seperti ruangan aula kantor desa untuk menggelar rapat-rapat dan pertemuan masyarakat nelayan untuk menyiapkan dan menyusun langkah-langkah gerakan yang akan dilakukan. Dukungan lainnya yang diberikan Ahmad Sahidan yakni dengan aparat perangkat desa lainnya bersama-sama ikut serta melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD Tanah Laut. Sehingga secara simbolis, masyarakat nelayan merasa lebih percaya diri karena didukung penuh oleh representasi kekuatan eksekutif dan legislatif Desa Tabanio.

Di level supra-desa, dukungan dari elit-elit politik di Kabupaten Tanah Laut telah memberikan stimulus dan kepercayaan diri bagi aktor-aktor gerakan untuk menggolong gerakan masyarakat nelayan Tabanio secara lebih masif. Terdapat beberapa elit politik yang mampu memberikan dukungan hingga gerakan ini dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan gerakan. Pertama, dukungan dari Khairil Anwar selaku anggota DPRD Tanah Laut Fraksi Partai Gerindra. Khairil Anwar berperan sebagai mediator untuk mempertemukan aktor-aktor gerakan dengan Hajjah Mariana selaku Ketua Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Khairil Anwar membantu gerakan untuk mengawal tuntutan masyarakat nelayan agar segera dilakukan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tanah Laut, sekaligus mendorong anggota DPRD untuk melakukan inspeksi langsung ke Desa Tabanio guna menelusuri permasalahan yang terjadi. Dalam proses pembentukan gerakan, Khairil juga banyak memberikan masukan kepada aktor-aktor gerakan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang bisa diakses oleh gerakan. Bahkan dari pengakuan Muhammad Iqbal, beberapa kali rapat yang dilakukan oleh aktor-aktor gerakan dilakukan di rumah Khairil Anwar. Dukungan Khairil dalam konteks ini telah memberikan sinyal penting yang dapat diterjemahkan oleh aktor-aktor gerakan terkait keberpihakan Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio.

Dukungan elit politik berikutnya datang dari Hajjah Mariani, Ketua Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Saat melakukan pertemuan dengan aktor-aktor gerakan masyarakat nelayan, Hajjah Mariana memberikan garansi bahwa elit partainya di Tanah Laut akan memberikan dukungan politis, serta mendorong para kadernya di DPRD Tanah Laut segera mengagendakan RDP dengan masyarakat nelayan Tabanio.

Selain dukungan politis dari Partai Gerindra, Haji Nurdin Ketua PDIP Tanah Laut juga memberikan dukungan yang berpengaruh besar dalam memperkuat gerakan. Selain menginstruksikan seluruh kepada kader partainya yang duduk di DPRD Tanah Laut untuk memberikan dukungan kepada nelayan Tabanio dalam RDP yang akan diadakan, Haji Nurdin juga turun langsung bergabung dengan masyarakat nelayan yang berdemonstrasi menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka agar diakomodir oleh pemerintah daerah. Sebanyak 300 orang masyarakat nelayan Tabanio pada tanggal 14 April 2022 melakukan unjuk rasa dan melakukan orasi terbuka di halaman gedung DPDR Tanah Laut, dengan membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan beberapa tuntutan terkait persoalan pengelolaan distribusi Solar bersubsidi oleh SPBN Tabanio. Tuntutan yang disampaikan masyarakat nelayan yakni sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Tanah Laut harus bentuk Pansus (Panitia Khusus), usut dugaan manipulasi data untuk BBM Solar subsidi di Desa Tabanio.
2. Usut tuntas mafia BBM Solar subsidi di Desa Tabanio.
3. Jangan memainkan harga BBM Solar subsidi di Desa Tabanio.

Kehadiran Haji Nurdin yang turut memberikan orasi dalam demonstrasi tersebut secara simbolis memberikan sinyal bahwa gerakan ini mendapat dukungan kuat dari PDIP sebagai kekuatan dominan di DPRD Tanah Laut. Saat Partai Gerindra dan PDIP satu suara memberikan dukungan dalam RDP terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio, maka fraksi partai-partai lain tidak memiliki kuasa untuk menghalau tuntutan masyarakat nelayan. Dalam pertemuan tersebut semua

fraksi akhirnya memberikan dukungan agar tuntutan gerakan segera diusut dan dielesaikan pemerintah, sehingga menjadi sebuah keputusan final yang diambil oleh DPRD Tanah Laut. Dukungan Partai Gerindra dan PDIP secara politis terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio telah menutup peluang Hajjah Nurul untuk mencari aliansi maupun perlindungan kepada elit-elit partai politik lainnya.

Kuatnya dukungan elit-elit politik membuat DPRD Tanah Laut memberikan perhatian serius terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio. Pada tanggal 17 Mei 2022, Rapat Dengar Pendapat II dilakukan oleh DPRD Tanah Laut dengan menghadirkan *stakeholder* terkait, seperti pihak Pengelola SPBN Tabanio, PT. Pertamina dari kantor perwakilan Banjarmasin, Dinas Perikanan dan Kelautan Tanah Laut, Kepala Desa dan BPD Tabanio serta beberapa orang perwakilan masyarakat nelayan Tabanio. Dalam RDP II tersebut, Hajjah Nurul Tasiah selaku pengelola SPBN Tabanio akhirnya mengakui bahwa kuota 110.000 liter BBM Solar bersubsidi yang diterima dari PT. Pertamina, tidak sepenuhnya disalurkan kepada nelayan. Pihak pengelola SPBN Tabanio juga mengakui bahwa walaupun kapal masyarakat nelayan Tabanio hanya berjumlah 160 buah, tetapi laporan yang disampaikan kepada PT. Pertamina tetap berjumlah 250 buah kapal. Oleh sebab itu, masyarakat nelayan Tabanio menyatakan mosi tidak percaya terhadap Hajjah Nurul Tasiah sebagai pengelola SPBN Tabanio, dan meminta kepada PT. Pertamina dan pemerintah daerah agar Hajjah Nurul Tasiah segera diganti dengan manajemen baru.

## KESIMPULAN

Studi gerakan perlawanan masyarakat nelayan Desa Tabanio telah menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan maupun perubahan kebijakan publik tidak selalu berbentuk siklus kebijakan yang berjalan teknokratik, linear dan bersifat legal-formal seperti yang dikemukakan logika umum dalam teori-teori kebijakan publik klasik (Dunn, 2000; Lester dan Steward, 2000; Nugroho, 2020). Dalam kondisi tertentu, kemunculan gerakan sosial mampu

mempengaruhi mekanisme perubahan kebijakan publik, sehingga prosesnya berjalan diluar dari tahapan-tahapan logika konvensional dan kaku. Proses perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat non-konvensional karena tuntutan suatu gerakan, secara tidak langsung turut dipengaruhi oleh terbukanya struktur peluang politik yang memberikan momentum terhadap gerakan untuk muncul ke permukaan.

Variabel-variabel yang menandai terbukanya struktur peluang politik yang memicu munculnya gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio ternyata tidak berada pada sistem politik tunggal, melainkan kombinasi sistem politik yang merepresentasikan lapisan konstelasi politik pada level desa dan lapisan konstelasi politik pada level supra-desa. Walaupun struktur peluang politik di level supra-desa terbuka, namun jika struktur peluang politik pada level desa tertutup maka kemunculan gerakan masyarakat nelayan Tabanio tidak dapat terbentuk secara masif dan berjalan efektif, begitu juga sebaliknya. Bagi aktor-aktor yang akan menggalang gerakan yang berbasis pada masyarakat pedesaan, perlu untuk mengkalkulasikan dengan cermat terbukanya struktur peluang politik yang terdapat pada level desa dan level supra-desa.

Melalui studi ini dapat dikatakan bahwa pendekatan struktur peluang politik dalam menganalisis kemunculan dan keberhasilan suatu gerakan bersifat elit-sentris, dimana variabel-variabel terbukanya struktur peluang politik sangat ditentukan dari konfigurasi relasi antar kelompok elit dan bagaimana mereka memainkan peranannya. Hadirnya studi ini semakin menegaskan apa yang telah dikemukakan oleh teoritis pengusung pendekatan proses politik (Tarrow, 1998; McAdam, 2001; Meyer, 2004) bahwa untuk mencapai keberhasilannya, aktor-aktor gerakan perlu mencari momentum yang tepat dalam suatu lingkungan politik sehingga mereka dapat berada dalam situasi yang menguntungkan untuk membangun gerakan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bassis, M., Gelles, R., & Levine, A. (1980). *Sociology: An Introduction*. New York: Random House.
- Della, P., Donatella, & Diani, M. (1999). *Social Movements: An Introduction*. UK: Oxford University Press.
- Diani, Mario, & Doug McAdam. (2003). *Social Movement and Network: Relational Approach to Collective Action*. UK: Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (M. Darwin, Ed.) Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jenkins, J. C., & Klandermans, B. (1995). *The Politics of Social Protest: Comparative Perspective on States and Social Movements*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Klandermans, Bert, & Roggenband, C. (2006). *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. Amsterdam: Spingers.
- Klandermans, B. (1997). *The Social Psychology of Protest*. Oxford/Cambridge: MA: Blackwell.
- Marx, T. G., & Goodman, N. (1980). *Sociology Classic and Popular Approaches*. New York: Random House.
- McAdam, Douglas, & Tarrow, S. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Meyer, D. (2002). *Social Movement: Identity, Culture & the State*. New York: Oxford University Press.
- Meyer, D. (2002, January 11-13). Social movements and public policy: eggs, chicken, and theory". *paper prepared for workshop Social Movements, Public Policy, and Democracy*.
- Meyer, D. (2004). Protest and Political Opportunities. *Annual Review of Sociology*, pp. 125-145.
- Mirsel, R. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.
- Nasrullah. (2021). *Gerakan Laung Bahenda: Militansi Orang Dayak Bakumpai Menjaga Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Sawit di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

- Nugroho, R. (2020). *Public Policy* (6 ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Scokpol, T. (1991). *Negara dan Revolusi Sosial, Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina*, (terj.). Jakarta: Erlangga.
- Scott, J. (1994). *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Singh, R. (2001). *Social Movements, Old and New: a Post-Modernist Critique*. New Delhi/Thousand Oaks/London: Sage Publications.
- Situmorang, A. W. (2008). *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial* (terj). Jakarta: Prenada.
- Tarrow, S. (1993). "Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention.". *SOCIAL SCIENCE HISTORY*, 17(2), 281–307.
- Tarrow, S. (1995). "The Europeanisation of Conflict: Reflections from a Social Movement Perspective.". *West European Politics*, 18(2), 223–251.
- Tarrow, S. (1998). *Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement : Social Movement and Contentious Politics; Revised and Updated Third Edition 3rd Ed.* (3 ed.). New York: Cambridge University Press.
- Wilson, J. (1973). *Introduction to Social Movements*. New York: Basic Books.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research Design and Methods*. Sage Publication.